



## PENGUNAAN AKRONIM “AUM” DALAM KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DENGAN MASYARAKAT

I Nyoman Surpa Adisastra<sup>1</sup>, Bagus Ade Tegar Prabawa<sup>2</sup>, Ni Nyoman Ayu Swarthini<sup>3</sup>, I Dewa Agung Wahyu Arinatha<sup>4</sup>  
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar<sup>1234</sup>

### Abstract

*Religious symbols or terms are often used in political contests in Indonesia, including in Bali. In Tabanan Regency, under the leadership of Regent I Komang Gede Sanjaya and Deputy Regent I Made Edi Wirawan, the vision is articulated as “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani (AUM)”. The use of the acronym “AUM” is particularly interesting, as in Hinduism, the term “AUM” symbolizes the divine power of God with its three manifestations: Brahma, Vishnu, and Shiva. This study aims to: 1) Examine the meaning of the acronym “AUM” in the communication between the Tabanan Regency Government and the community; 2) Identify the impact of using the acronym “AUM” in such communication; and 3) Analyze the social ethics of using “AUM” in Tabanan Regency. This research used Semiotics Theory, Mass Communication Effects Theory, and Social Morality Theory. This research adopts a qualitative descriptive approach, with informants selected through purposive sampling. The findings indicate that the use of the acronym “AUM” in communication carries both political and philosophical significance. It is perceived to have positive impacts. From a social ethics perspective, the use of the acronym “AUM” has not yet received formal criticism, but further socialization is encouraged. In conclusion, the use of the acronym “AUM” by the Tabanan Regency Government is having positive impacts. However, broader socialization is necessary to clarify the distinction between the political aspect of “AUM” as an acronym and “AUM” as a sacred symbol in Hinduism.*

### Keywords

*AUM, communication, Hinduism*

<sup>1</sup> [surpaadisastra@uhnsugriwa.ac.id](mailto:surpaadisastra@uhnsugriwa.ac.id)

<sup>2</sup> [tegarprabawa@uhnsugriwa.ac.id](mailto:tegarprabawa@uhnsugriwa.ac.id)

<sup>3</sup> [ayuswarthini@uhnsugriwa.ac.id](mailto:ayuswarthini@uhnsugriwa.ac.id)

<sup>4</sup> [dwagungw@gmail.com](mailto:dwagungw@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan konstitusi serta aturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Prinsip persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menegaskan bahwa pemerintah tidak membedakan pelayanan kepada penduduk karena perbedaan latar belakang suku maupun agama. Namun demikian, dalam kontestasi politik guna menduduki posisi eksekutif maupun legislatif, tidak jarang partai politik atau kandidat menggunakan simbol-simbol atau menyerupai simbol-simbol keagamaan dalam penyusunan visi, misi, motto, dan sebagainya. Penggunaan simbol-simbol tersebut berpotensi membangun suasana kedekatan karena persamaan pemilih dan calon atau membangkitkan emosi keagamaan pemilih dalam menentukan pilihannya saat pemilihan umum (pemilu), khususnya ketika pemungutan suara berlangsung.

Penggunaan simbol dalam komunikasi tidak lepas dari berbagai kepentingan sesuai dengan fungsi simbol tersebut, seperti mewakili ide atau konsep tertentu, mempermudah komunikasi, menandai identitas, menarik konsumen, atau menyampaikan pesan simbolik (<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/mengenal-arti-simbol-jenis-dan-fungsinya-209W17KbLX9/full>). Demikian pula dalam komunikasi politik atau pemerintahan, penggunaan simbol menjadi bagian yang penting. Berbagai simbol, seperti tanda atau bahasa acap kali digunakan dalam proses politik maupun penyelenggaraan

pemerintahan. Simbol mempermudah komunikasi atau menyampaikan pesan simbolik yang tertera pada visi dan misi maupun program pemerintah. Sebab pada praktiknya, komunikasi politik tidak sebatas memenangkan kontestasi elektoral, melainkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Gulo et al., 2022).

Penggunaan simbol atau pun istilah yang bercorak keagamaan bukan sesuatu yang baru dalam kontestasi politik di Indonesia, termasuk di Bali. Misalnya istilah Sad Kerthi, Tri Hita Karana, Vasudhaiva Kutumbakam, dan lain sebagainya cukup marak digunakan dalam perumusan visi maupun misi kontestan politik. Biasanya istilah tersebut digunakan untuk mencoba menunjukkan komitmen atau keberpihakan terhadap pembangunan, kesejahteraan sosial, kemanusiaan, lingkungan, dan lainnya. Namun Kabupaten Tabanan semenjak dipimpin oleh Bupati Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M bersama Wakil Bupati, I Made Edi Wirawan, S.E menyatakan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani (AUM)”. Visi tersebut dinyatakan sejak keduanya maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada 2020. Penggunaan akronim “AUM” menjadi menarik, karena istilah “AUM” dalam agama Hindu merupakan simbol kekuatan Tuhan dengan ketiga manifestasinya, yakni Brahma pada saat mencipta (utpatti), Wisnu saat memelihara (sthiti), dan Siwa saat melebur (pralina). Simbol “AUM” secara umum biasanya dilafalkan dengan “Om”

yang kemudian disebut dengan pranawa mantra “Om kara” atau jika di Jawa dan Bali disebut “Ong kara”. “Ong kara” oleh pendapat lain dinyatakan berasal dari aksara Ang, Ung, dan Mang. Meski begitu ada juga pendapat bahwa AUM merupakan penyatuan huruf awal dari Ang, Ung, dan Mang (Nata & Gunawijaya, 2021).

Kata “Aman, Unggul, Madani” dengan akronim “AUM” bisa ditemui di berbagai spanduk atau banner yang terpampang pada kantor-kantor maupun acara-acara yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan. Bahkan pada Agustus 2023 Pemkab Tabanan meluncurkan program Stimulus Infrastruktur Daerah Aman Unggul Madani (Sida AUM) (<https://www.detik.com/bali/berita/d-6904972/bupati-tabanan-luncurkan-program-sida-aum-alokasikan-rp-1-9-miliar>). Tampaknya akronim “AUM” berusaha tetap dipertahankan secara konsisten oleh Pemkab Tabanan dalam menyosialisasikan program-programnya sebagai komunikasi dengan masyarakat. Namun demikian, perlu diteliti lebih mendalam penggunaan akronim tersebut sebagai bagian dari komunikasi politik yang tertera dalam visi sejak awal pasangan I Komang Gede Sanjaya dan I Made Wirawan maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, tim peneliti mengangkat penelitian berjudul “Penggunaan Akronim “AUM” dalam Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Masyarakat”.

Artikel berjudul Tindakan Sosial Penggunaan Simbol Agama dalam Poster Kampanye Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Banten yang ditulis oleh Abdul

Malik, dkk pada tahun 2019 menyatakan pada tahap pembentukan citra politik ketika melakukan kampanye dapat dikatakan sebagai personal branding yaitu dengan maksud mengidentifikasi seseorang dengan sesuatu yang digunakan tetapi memiliki efek yang sangat nyata, hal ini digunakan untuk membuat atau memberi tanda bagi calon legislatif kepada para pemilih atau masyarakat pada saat pemilihan umum (pemilu). Penggunaan simbol agama pada poster diyakini para elite politik sebagai tindakan politik yang dilakukan ketika berkampanye pada pemilihan umum. Sesungguhnya, tindakan politik dalam peristiwa komunikasi politik bertujuan untuk membentuk citra (image) politik bagi khalayak (masyarakat), yaitu gambaran mengenai realitas politik yang memiliki makna. Artikel ini berkontribusi pada penelitian yang dilaksanakan oleh tim, terkait penggunaan simbol agama dalam kampanye. Namun demikian, penelitian yang dilaksanakan oleh tim dalam hal ini membahas akronim “AUM” yang serupa dengan pranawa mantra “AUM” sebagai simbol sakral umat Hindu.

Artikel berjudul Penggunaan Simbol Agama yang Membentuk Stereotip dari Persepsi Masyarakat ditulis oleh Aura Maharani W.W, dkk pada 2021 menyatakan bahwa manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya yang rasional dengan senantiasa menghubungkan segala sesuatu hal yang ada dipikarnya dengan simbol tertentu yang dilihatnya. Yang dimana membuat seseorang memiliki pemikiran untuk memberi penilaian generalisasi kepada sebuah kelompok, organisasi, atau lembaga hanya dengan

melalui simbol yang baru saja dilihat. Dalam penggunaannya simbol, manusia mengungkapkan dan merepresentasikan siapa dirinya, dan mengungkapkan bagaimana dirinya berinteraksi dengan sesama individu dalam sebuah kelompok, serta mengungkapkan dirinya berinteraksi dengan Tuhan melalui simbol keagamaan. Konsep simbol juga dapat diartikan sebagai sebuah petanda yang menciptakan ide atau gagasan persepsi serta stereotip kepada suatu hal yang berkaitan dengan keagamaan. Konsep simbol juga dapat diartikan sebagai sebuah petanda yang menciptakan ide atau gagasan persepsi serta stereotip kepada suatu hal yang berkaitan dengan keagamaan. Artikel ini berkontribusi pada penelitian tim, terkait makna penggunaan akronim “AUM” pada masyarakat Tabanan yang mayoritas beragama Hindu. Namun demikian, penelitian ini fokus pada komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan masyarakat.

Artikel berjudul Analisis Strategi Komunikasi Politik Jaya Negara dalam Membentuk Political Branding Melalui Media Sosial Instagram oleh Ni Putu Kurnia Dewi Lestari, dkk pada 2023 menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan ketika kampanye merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam memperoleh suara. Jaya Negara mengatakan bahwa ia menggunakan masa kampanye untuk melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Karena sikapnya yang memiliki kepedulian terhadap seni dan terhadap sesama makhluk hidup tidak mengherankan jika dalam visi misi yang mengedepankan unsur pelestarian

budaya serta motonya yakni Vasudhaiva Kutumbakam yang artinya “semua bersaudara”. Tentunya kedua visi misi tersebut nantinya dapat menciptakan citra serta kepercayaan masyarakat. Citra seorang kandidat sangat berpengaruh, karena dalam memilih seorang pemimpin hal utama yang menjadi pertimbangan serta perhatian dari masyarakat. Citra yang tonjolkan bisa dilihat dari berbagai hal, mulai dari kepribadian, gaya memimpin, latar belakang keluarga, partai pendukung dan masih banyak lagi. Artikel ini berkontribusi pada komunikasi politik dalam membentuk political branding terkait penggunaan akronim “AUM” dalam visi maupun program pemerintah. Perbedaannya, artikel membahas terkait kemenangan Jaya Negara dalam pemilihan Walikota Denpasar, namun penelitian ini pada komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana makna penggunaan akronim “AUM” dalam komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan masyarakat? (2) Bagaimana dampak penggunaan akronim “AUM” dalam komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan masyarakat? (3) Bagaimana etika sosial masyarakat dalam penggunaan “AUM” di Kabupaten Tabanan? Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yakni: (1) Untuk mengkaji makna penggunaan akronim “AUM” dalam komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan masyarakat. (2) Untuk mengetahui dampak penggunaan

akronim “AUM” dalam komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan masyarakat. (3) Untuk mengkaji etika sosial masyarakat dalam penggunaan “AUM” di Kabupaten Tabanan.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif mengacu pada usaha para peneliti untuk secara jelas dan sistematis menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena hasilnya dapat diamati secara langsung, memungkinkan untuk mendeskripsikan hal-hal yang relevan dengan masalah penelitian. Para peneliti terlibat langsung dalam observasi lapangan untuk meneliti penggunaan akronim “AUM” dalam komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Makna penggunaan akronim “AUM” dalam komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan masyarakat**

Pembahasan mengenai makna akronim “AUM” dalam penelitian ini berkaitan dengan Teori Semiotika. Teori yang dikemukakan Charles Sanders Peirce (dalam Hendro, 2020) ini menyatakan bahwa tanda terdiri dari tiga unsur utama, yakni:

- 1) Representamen: Merupakan bentuk fisik dari tanda tersebut, yang mencakup segala sesuatu yang dapat diinterpretasikan sebagai tanda.
- 2) Objek: Merupakan hal atau konsep di dunia nyata yang direpresentasikan oleh tanda tersebut.

- 3) Interpretan: Merupakan makna atau interpretasi yang dihasilkan oleh tanda tersebut dalam pikiran penerima atau pengguna tanda.

Peirce juga mengidentifikasi tiga jenis tanda, yaitu:

- 1) Ikon: Tanda yang memiliki hubungan ikonik dengan objek yang direpresentasikannya, misalnya gambar atau citra yang menyerupai objek tersebut.
- 2) Indeks: Tanda yang memiliki hubungan indeksikal atau kausal dengan objek yang direpresentasikannya, misalnya asap sebagai tanda keberadaan api.
- 3) Simbol: Tanda yang memiliki hubungan konvensional dengan objek yang direpresentasikannya, di mana hubungan antara representamen dan objek ditentukan oleh konvensi atau kesepakatan, seperti kata-kata dalam bahasa.

Sebuah representasi (tanda) merujuk pada objeknya melalui tiga metode utama. Pertama, melalui kesamaan yang disebut sebagai tanda ikonis, yang bisa berupa gambaran visual atau verbal. Kedua, tanda menghubungkan dirinya dengan objeknya melalui penunjuk atau menggunakan wahana tanda yang menunjuk pada sesuatu, yang disebut sebagai tanda indeksis (indexical). Tanda indeksis adalah wahana tanda yang menyerupai busur panah atau gambar telunjuk yang menunjuk pada sesuatu. Kehadiran wahana tanda semacam ini bergantung pada keberadaan objek eksternal yang diacu. Ketiga, sebuah wahana tanda merujuk pada objeknya melalui kesepakatan. Hubungan semacam ini disebut sebagai hubungan

simbolis, dan tanda tersebut disebut sebagai tanda simbolis (Hendro, 2020).

Wardani, dkk (2023) menyebut bahwa manusia telah memahami bahwa melalui penggunaan simbol, mereka dapat mengekspresikan dan merepresentasikan identitas diri, serta menunjukkan bagaimana mereka berinteraksi dengan individu lain dalam sebuah kelompok. Selain itu, simbol juga digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan melalui simbol-simbol keagamaan. Simbol juga bisa diartikan sebagai penanda yang menciptakan persepsi, gagasan, atau stereotip terkait hal-hal yang berkaitan dengan agama.

Istilah “AUM” dalam agama Hindu merupakan simbol kekuatan Tuhan dengan ketiga manifestasinya, yakni Brahma pada saat mencipta (utpatti), Wisnu saat memelihara (sthiti), dan Siwa saat melebur (pralina). Simbol “AUM” secara umum biasanya dilafalkan dengan “Om” yang kemudian disebut dengan pranawa mantra “Om kara” atau jika di Jawa dan Bali disebut “Ong kara”. “Ong kara” oleh pendapat lain dinyatakan berasal dari aksara Ang, Ung, dan Mang. Meski begitu ada juga pendapat bahwa AUM merupakan penyatuan huruf awal dari Ang, Ung, dan Mang (Nata & Gunawijaya, 2021).

Nata dan Gunawijaya juga menyatakan bahwa Om-Kara adalah gabungan aksara suci Hindu yang terdiri dari tiga suku kata, yaitu Ang, Ung, dan Mang. Jika huruf awal ketiga suku kata tersebut disatukan, akan membentuk kata AUM. Kata AUM ini kemudian mengalami persandian dan berubah menjadi OM. Omkara dalam Tattwa adalah simbolis perwujudan dari Tuhan, sehingga banyak Tattwa-tattwa yang

mengulas hakikat dari Om-kara, salah satunya teks Lontar Sang Hyang Mahajnana (Nata & Gunawijaya, 2021).

Jika dianalisis menggunakan Teori Semiotika yang dikemukakan Pierce, maka “AUM” sebagai representamen. Dalam konteks agama Hindu, “AUM” merupakan simbol Tuhan dalam konsep Tri Murti. Tri Murti dalam hal ini sebagai objek, sehingga interpretan yang muncul, ketika umat Hindu secara umum membaca “AUM” dalam konteks agama Hindu, maka dimaknai sebagai simbol ketuhanan. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Tabanan membenarkan bahwa dalam konteks Agama Hindu, simbol “AUM” merujuk pada Tri Murti. Sementara itu, penggunaan “AUM” oleh Pemkab Tabanan merupakan akronim dari Aman, Unggul, Madani. Namun demikian, dilihat dari sisi religius, akronim tersebut menarik karena seolah-olah memiliki esensi agama Hindu sesuai dengan pranawa mantra “AUM”. Penggunaan akronim “AUM” telah digunakan semenjak Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M bersama I Made Edi Wirawan, S.E maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan pada 2020.

“Kalau dalam konteks agama, sudah pasti yang dimaksud (AUM) adalah Ang Ung Mang. “A” itu adalah Agni, “U” itu adalah Uddaka, dan “M” itu adalah Maruta, Brahma Wisnu dan Siwa. Kebetulan sekali akronim yang digunakan oleh Pemda dan juga dari agama mirip, tetapi makna yang berbeda, dua konteks yang berbeda,” (I Gede Ketut Sulistyaadi, S.Pd.H, 62 tahun, wawancara 23 Juli 2024).

Bupati Sanjaya saat diwawancara oleh tim peneliti, 26 Juni 2024 menuturkan bahwa sesuai dengan aturan dalam pencalonan sebagai kepala daerah, maka diperlukan visi dan misi. Ia bersama tim kemudian menyusun visi dan misi yang dijadikan panduan dalam memimpin Kabupaten Tabanan jika terpilih. Visi dan misi tersebut terangkum menjadi Aman, Unggul, Madani.

“3,5 atau sekitar 4 tahun yang lalu sebelum saya menjadi bupati dan wakil bupati, kan ada sebuah amanat undang-undang, dimintakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyiapkan visi misinya. Nah waktu itu, sebelum saya menjadi bupati saya berpikir, apa yang cocok dengan karakteristik kabupaten Tabanan ini,” (I Komang Gede Sanjaya, 58 tahun, wawancara 26 Juni 2024).

Bupati Sanjaya tidak menampik bahwa akronim “AUM” yang dicantumkan dalam visi Pemerintah Kabupaten Tabanan terinspirasi dari “AUM” dalam Agama Hindu. Hal ini terkait dengan konsep Tri Murti. Terkait konsep Tri Murti, Triguna (2018) menyatakan bahwa dalam Hindu, Tuhan yang satu berkembang menjadi tiga konsep utama. Sebagai Pencipta, Ia disebut Dewa Brahma bersama saktinya Saraswati. Sebagai Pemelihara, Ia dikenal sebagai Dewa Wisnu dengan saktinya Sri, dan dalam manifestasi sebagai Pelebur, Ia disebut Dewa Siwa dengan saktinya Durga. Ketiga manifestasi Tuhan dengan fungsi yang berbeda ini dikenal dengan istilah Tri Murti, yang dipuja di Pura Desa untuk Dewa Brahma, di Pura Puseh untuk

Dewa Wisnu, dan di Pura Dalem untuk Dewa Siwa. Konsep ini diterapkan di lebih dari 2.400 desa adat di Bali, serta desa-desa dengan budaya Bali di seluruh Indonesia. Tuhan yang satu ini terwujud dalam tiga fungsi utama, yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa, yang juga mencerminkan siklus kehidupan: lahir (Brahma), hidup (Wisnu), dan mati (Siwa), atau yang dalam agama Hindu disebut dengan uttpeti, stitthi, dan pralina.

Konsep Tri Murti ini, menurut Bupati Sanjaya kemudian diaplikasikan dalam membangun Kabupaten Tabanan, mulai dari hulu, tengah, hingga hilir. Pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan ini diarahkan untuk kemajuan Kabupaten Tabanan, khususnya dan Bali secara umum. Pembangunan meliputi aspek Sumber Daya Manusia (SDM) maupun fisik berupa infrastruktur yang dibutuhkan dalam memajukan daerah dan masyarakat Kabupaten Tabanan.

“Kalau saya lihat, pertama karena membangun kabupaten yang hampir 133 desa, tidak ada kelurahan, berbasis desa. Cara membangun desa ini ternyata dari hulu, bukan dari hilir saja. Kalau kadang-kadang kita kan membangun di hilirisasi saja, setelah jadi baru kita membangun ini, nggak dari hulu. Jadi dari hulu itu terinspirasi dari Ang, tengah itu Ung, di hilir adalah Mang. Bagaimana kita umat Hindu sedharma, kebetulan saya orang Bali beragama Hindu, sangat memiliki sebuah keyakinan, filosofi bahwa di ajaran agama Hindu, sang pencipta adalah Brahma, simbolnya Ang. Sang pemelihara adalah Wisnu, simbolnya Ung, dan Mang sebagai sang pelebur,

sebagai Siwa,” (I Komang Gede Sanjaya, 58 tahun, wawancara 26 Juni 2024).

Berdasarkan pernyataan Bupati Sanjaya tersebut, pihaknya memaknai “AUM” tidak hanya sebagai akronim dari Aman, Unggul, Madani, namun juga sebagai “AUM” yang merupakan aksara suci dalam agama Hindu. Namun demikian, secara eksplisit dalam konteks visi yang diuraikan dalam misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, khusus menjabarkan tentang Aman, Unggul, dan Madani. Sementara pemaknaan secara filosofis tidak tercantum.

#### **Dampak penggunaan akronim “AUM” dalam komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan masyarakat**

Pada teori efek komunikasi yang dikembangkan Paul Lazarsfeld bersama rekan-rekannya, terutama Bernard Berelson dan Hazel Gaudet, dalam penelitiannya menggunakan model efek dua tahap (two-step flow model) dalam komunikasi massa. Berdasarkan model ini, informasi tidak langsung disampaikan dari media kepada masyarakat, namun melalui perantara yang disebut sebagai “opinion leader” (pemimpin opini) yang berperan penting dalam menyebarluaskan informasi dan mempengaruhi pendapat orang lain. Pendekatan ini menunjukkan efek komunikasi tidak hanya terjadi secara langsung dari media kepada individu, namun melalui interaksi sosial dan proses penyebaran informasi dari individu ke individu lainnya.

Harlinah (dalam Fitriansyah, 2018) menuliskan bahwa 3 (tiga) dimensi efek komunikasi massa terdiri dari efek kognitif, afektif, dan efek behavioral.

Lebih jelas, ketiga efek tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Efek Kognitif merupakan dampak yang timbul pada pikiran individu akibat menerima informasi yang dianggap bernilai informatif. Efek Kognitif berbicara tentang cara media massa membantu individu dalam mendapatkan informasi bermanfaat dan meningkatkan kemampuan kognitif individu tersebut. Dari media massa, individu mendapatkan berbagai informasi, termasuk tentang objek, politik, tempat baru, dan sebagainya.
- 2) Efek Afektif, yakni efek yang memengaruhi emosi individu. Efek ini berdampak lebih besar daripada efek kognitif. Komunikasi massa bertujuan tidak sebatas menyampaikan informasi kepada audiens, namun juga bisa memicu respon emosional dari audiens setelah menerima informasi tersebut. Dengan demikian audiens merasakan secara emosional sesuatu yang dilihat atau dengar. Efek afektif dalam komunikasi massa dipengaruhi beberapa faktor, misalnya faktor emosional, kognitif, serta situasional lingkungan.
- 3) Efek perilaku berdampak lebih kuat daripada efek afektif karena mengarah pada perubahan perilaku individu. Perubahan perilaku bisa mencakup situasi di mana audiens tertarik untuk melakukan sesuatu setelah melihat iklan atau tayangan di media massa.

Penggunaan akronim “AUM” secara tidak langsung berdampak pada masyarakat Kabupaten Tabanan yang merupakan mayoritas beragama Hindu, meskipun dalam hal ini konteks “AUM”



sebagai Aman, Unggul, Madani. Hal ini dikarenakan dalam komunikasi lisan Pemerintah dengan masyarakat, tidak jarang menyinggung “AUM” dalam konteks keagamaan. Bupati Sanjaya menjelaskan, nilai filosofis “AUM” menginspirasi pihaknya dalam kepemimpinan. Pemerintah dalam angan-angannya, bisa memimpin layaknya konsep Tri Murti. Mulai dari pencipta, kemudian memelihara, hingga melebur. Meskipun, jika dikomparasi secara langsung antara “AUM” sebagai simbol ketuhanan dengan “AUM” sebagai akronim, berbeda arti.

“Jadi di situ memang ada filosofi agama, tapi bukan berarti kita mengagamakan sebuah program, tapi itu bagian dari simbol-simbol saja, biar kita ndak salah. Sehingga apa, sehingga sang pencipta itu bagaimana memiliki ide-ide yang betul-betul mulia, adi luhung, ide-ide yang nanti betul-betul menyejahterakan masyarakat. Memelihara, bagaimana memelihara masyarakat Tabanan ini menjadi masyarakat yang Aman, Unggul, Madani. Juga sang pelebur, di hilir ini, bagaimana yang tidak baik akan kita baikan, sehingga yang selama ini bengkok, kita luruskan. Nah itu filosofi-filosofi kenapa kita memakai Ang-Ung-Mang menjadi Om. Om itu simbol kita adalah sejahtera. Aman dulu, unggul dulu, madani dulu. Madani bagian daripada kita memiliki akhlak yang mulia. Kalau tiga hal ini kita lakukan, kita bisa kerjakan, astungkara sejahtera, Om itu bisa kita lakukan,” (I

Komang Gede Sanjaya, 58 tahun, wawancara 26 Juni 2024).

Efek kognitif yang muncul dari penggunaan “AUM” terdiri dari dua sisi, yakni dalam konteks keagamaan yang familiar dengan konsep ketuhanan dalam agama Hindu dan pemahaman baru tentang Aman, Unggul, dan Madani. Pada sisi keagamaan, penggunaan “AUM” sebagai akronim menunjukkan sisi pemerintahan yang terkesan berlandaskan nilai keagamaan, khususnya Hindu. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Bupati Sanjaya yang mengakui bahwa konsep kepemimpinannya tidak lepas dari nilai filosofis “AUM” sebagai simbol ketuhanan. Penggunaan “AUM” menjadi strategi komunikasi yang menjadi media pendekatan pemerintah dengan masyarakat Tabanan yang mayoritas penganut Hindu.

Pada sisi lainnya, “AUM” sebagai akronim Aman, Unggul, dan Madani menjadi informasi baru bagi masyarakat Tabanan secara umum, semenjak pencalonan I Komang Gede Sanjaya sebagai Bupati yang berpasangan dengan I Made Edi Wirawan sebagai Wakil bupati hingga kepemimpinan I Komang Gede Sanjaya sebagai Bupati didampingi I Made Edi Wirawan sebagai Wakil Bupati Tabanan. Visi Aman, Unggul, Madani (AUM) dicantumkan dalam berbagai media informasi, baik milik pemerintah maupun swasta. Contohnya spanduk maupun baliho seperti yang terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Spanduk mencantumkan akronim “AUM” di Kantor Bupati Tabanan  
(Sumber: dokumentasi peneliti 2024)

Jika dilihat dari sudut pandang komunikasi politik, maka visi Aman, Unggul, Madani (AUM) merupakan strategi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam upaya pendekatan dengan masyarakat. Dortje & Lopulalan (2023) menerangkan bahwa komunikasi politik adalah sistem komunikasi yang melibatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang bersifat mengikat untuk kepentingan bersama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Komunikasi politik sebagai bentuk komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik serta para aktor politik yang berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi politik bukanlah fenomena baru, melainkan dapat dipahami juga sebagai interaksi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Penggunaan akronim “AUM” dalam visi Pemerintah Kabupaten Tabanan yang merupakan visi pasangan calon Bupati I Komang Gede Sanjaya dan

Wakil Bupati Made Edi Wirawan ketika berkompetisi dalam Pilkada Tabanan 2020 juga berkaitan dengan strategi pemasaran politik. Nursal (dalam Andrias, 2013) menyatakan bahwa Strategi marketing politics, yang diadaptasi dari konsep strategi pemasaran dalam ilmu ekonomi, menuntut seorang komunikator politik untuk mahir dalam menarik perhatian dan memenangkan hati pemilih guna mendapatkan dukungan publik. Marketing politik adalah serangkaian kegiatan terencana dan taktis dengan perspektif jangka panjang, yang bertujuan menyebarkan makna politik kepada pemilih. Tujuan utamanya adalah membentuk serta menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi, dan perilaku pemilih agar secara konsisten memilih partai atau kandidat tertentu.

Penggunaan akronim “AUM” dalam komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabanan secara umum dinilai menimbulkan efek afektif berupa emosional positif. Apalagi pemerintah juga membuat slogan atau tagline “Bangga jadi Orang Tabanan”. Hal ini tentunya diikuti dengan program-

program yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai wujud implementasi visi dan misi. Dikutip dari <https://tabanan.go.id> Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan yakni:

1. Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman);
2. Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul); dan
3. Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani).

Perbekel Delod Peken yang juga sebagai Ketua Forum Perbekel Tabanan, I Gede Komang Restan Wisnawa mengungkapkan bahwa visi Aman, Unggul, Madani (AUM) menjadi salah satu acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung, di samping program dari pemerintah pusat, maupun Provinsi Bali. Hal ini dimulai dari mewujudkan Tabanan yang aman. Faktor keamanan sebagai hal dasar yang sangat penting untuk bisa mewujudkan unggul dan madani.

“Dalam konteks visi Bapak Bupati yang menggunakan kata Aman, Unggul, Madani, konteks di masyarakat karena yang dilihat sekarang adalah hasil karya. Tapi sudut pandang saya selaku perbekel, yang pertama bagaimana membuat masyarakat di Tabanan ini aman, sehingga dengan aman bagaimana kita membuat konektivitas mewujudkan Tabanan menjadi unggul,”

(I Gede Komang Restan Wisnawa, 64 tahun, wawancara 26 Juli 2024).

Restan melanjutkan, dalam konteks unggul, dilakukan pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) dari generasi nol, sebelum menikah, hingga mampu berkompetisi di berbagai bidang sesuai dengan potensi keunggulan pada masing-masing individu. Salah satu program yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 dinamakan Semara-Ratih yang berfokus pada penanganan perkawinan, salah satunya terkait administratif (<https://bali.antaranews.com/berita/300033/pemkab-tabanan-luncurkan-program-semara-ratih-urus-pencatatan-perkawinan>). Hal ini menurut Restan sejalan dengan konsep pemikiran pemerintah untuk mewujudkan generasi emas 2045. Program kemudian berlanjut ke kesehatan dan pencegahan stunting, mulai dari kesehatan ibu hamil maupun pemantauan kesehatan bayi melalui posyandu. Pada ranah pendidikan, selain intelektual juga ditanamkan mengenai pemahaman agama, seni, adat, dan budaya. Guna mendukung itu, pihaknya saat ini memiliki sanggar, seperti sanggar seni dan sanggar bahasa Bali. Keberhasilan ini dirasakan pihaknya, salah satunya terpilihnya Desa Delod Peken mewakili Kabupaten Tabanan ke PKB (Pesta Kesenian Bali) 2024.

Selanjutnya, pada konteks Madani, dikatakan Restan, pihaknya memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk berkreasi. Demikian pula memelihara keharmonisan di kalangan masyarakat dengan konsep pakedek pakenyung, paras paros, salunglung sabayantaka. Hal ini menurutnya melibatkan seluruh

elemen masyarakat, karena pihaknya sadar bahwa pemerintah tidak bisa bekerja tanpa dukungan masyarakat.

Beberapa program yang diterjemahkan dari visi Aman, Unggul, Madani (AUM) secara umum dinilai telah berdampak positif bagi masyarakat. Seperti diakui Ketua PHDI Tabanan, I Gede Ketut Sulistyaadi, S.Pd.H.

“Sesuai dengan pengetahuan kami di lembaga dan juga umat sejatinya, pertama memang bupati ataupun Pemda Kabupaten Tabanan, sudah mengarah seperti itu, Amannya memang sudah terpelihara bahkan mungkin ada peningkatan. Termasuk unggul dan madani sudah mengarah seperti itu. Dari masyarakat mungkin juga merasakan seperti itu. Kami selaku masyarakat Tabanan merasakan bagaimana perubahan setelah ada visi AUM ini secara tidak langsung kami rasakan, terutama dari segi pelayanan, transportasi, sudah mulai ada peningkatan walaupun belum seperti yang kita harapkan bersama,” (I Gede Ketut Sulistyaadi, S.Pd.H, 62 tahun, wawancara 23 Juli 2024).

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya mengklaim implementasi visi Aman, Unggul, Madani (AUM) berdampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pelaksanaan program-program yang dinilai berhasil menyentuh masyarakat. Hal ini dinilai dari berbagai prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan selama kurang lebih 3,5 tahun di bawah kepemimpinannya.

“Sudah pasti ada dampak. Masyarakat Tabanan kalau saya lihat masyarakat Tabanan dari mulai 10

kecamatan, 133 desa, desa adat ada 340-an, sangat merasakan aman dan nyaman dalam semua bidang, baik pendidikan dan kesehatan, baik infrastrukturnya sudah bagus sekarang, jaminan sosial ketenagakerjaan, baik ekonominya, pariwisatanya, semua terdampak aman. Unggul, kita banyak sekali mendapat prestasi, baik yang diberikan pusat untuk pemerintah, maupun prestasi yang diberikan oleh masyarakat. Madani, sejahtera selama ini astungkara penanganan stunting terbaik, SDM masuk 10 besar terbaik se-Indonesia, penghargaan indeks kemiskinan terbaik, astungkara berkat visi misi yang kita jalankan di Tabanan ini,” (I Komang Gede Sanjaya, 58 tahun, wawancara 26 Juni 2024).

Beberapa penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Tabanan selama kepemimpinan Bupati Sanjaya dan Wakil Bupati Edi, yakni:

1. BKN Award Kategori Implementasi Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tipe A Tahun 2021;
2. Penghargaan Nasional Pengelolaan Dana Desa Terbaik dari Kemenkeu RI Tahun 2022;
3. Penghargaan Nasional Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI Tahun 2023;
4. UHC Award Tahun 2023;
5. Penghargaan Nasional Daerah Peduli Stunting dan Kesehatan Tahun 2024;
6. Penghargaan Nasional Manggala Karya Kencana Tahun 2024;
7. Prestasi dalam Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) Tahun 2024;

8. Penghargaan dalam Kinerja Bidang Pertanian Provinsi Bali Tahun 2024, dan sebagainya.

**Etika sosial penggunaan akronim “AUM” dalam komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan masyarakat**

Teori Moralitas Sosial (Social Morality Theory) berpangkal dari pemikiran Thomas Hobbes (1588- 1679), Emile Durkheim (1858-1917) dan Max Weber (1864-1920). Teori ini menegaskan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat sangat penting, dengan moralitas sosial sebagai fondasi utama kehidupan. Moralitas sosial diperlukan untuk memastikan bahwa anggota masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan keamanan. Aturan yang ditetapkan oleh kelompok atau otoritas yang berwenang harus dijaga. Kelompok masyarakat memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran sosial, sehingga aturan moral bersifat kolektif. Dalam masyarakat, terdapat pemahaman bersama mengenai hal-hal yang dianggap baik dan buruk. Masyarakat memengaruhi perilaku, sikap, dan pola pikir individu. Segala aturan, larangan, dan norma yang dibuat oleh masyarakat bertujuan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan individu. Oleh karena itu, individu diharapkan patuh terhadap aturan yang ada (Maiwan, 2018).

Dalam teori ini, peran kelompok masyarakat dan otoritas yang berwenang sangat penting dalam menegakkan dan mengatur norma-norma moral yang berlaku. Masyarakat sebagai suatu keseluruhan memiliki otoritas untuk menentukan kebenaran

sosial dan menggarisbawahi apa yang dianggap baik dan buruk. Norma-norma moral sosial bersifat kolektif karena mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang bersama oleh anggota masyarakat. Pengaruh masyarakat terhadap individu juga sangat besar, di mana norma-norma moral sosial dapat memengaruhi tindakan, sikap, dan pemikiran individu dalam kehidupan sehari-hari. Patuh terhadap norma-norma ini dianggap penting untuk mencapai kesejahteraan bersama dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat.

Istilah “AUM” dalam masyarakat Hindu merupakan simbol yang dimaknai secara sakral. Hal ini sebagai pengejawantahan simbol ketuhanan yang bernilai religius. Pemaknaan ini didapatkan melalui pembelajaran agama Hindu, sehingga menjadi bagian dari pengetahuan dan diyakini secara umum di kalangan masyarakat Hindu. Sebagai simbol yang bermakna religius dan sakral, tentunya penggunaan “AUM” tidak sembarang. Penggunaannya dalam hal tertentu yang berkaitan dengan praktik keagamaan, misalnya dalam pembelajaran susastra, ritual, dan lainnya memiliki aturan khusus.

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya menjelaskan bahwa penggunaan akronim “AUM” dalam visi Pemerintah Kabupaten Tabanan secara eksplisit merupakan akronim Aman, Unggul, Madani. Namun demikian, Bupati Sanjaya tidak menampik bahwa “AUM” dalam konteks agama Hindu juga menginspirasi pihaknya dalam menggerakkan roda pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang dirinya yang merupakan masyarakat Bali

dan beragama Hindu. Di samping itu, dirinya juga sempat mengenyam pendidikan di Pascasarjana IHDN Denpasar (kini UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar) dan meraih gelar Doktor Ilmu Agama.

“Saya selama ini bukan hanya berbekal dunia politik, ternyata politik di-frame oleh ilmu agama. Jadi ilmu agama itu sangat relevan sekali dengan politik, sehingga kita menjalankan politik tidak salah, tidak berbasis agama kan bahaya kita nanti. Jadi astungkara selama ini saya sekolah kemarin di IHDN, sekarang menjadi UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, itu sangat berdampak positif. Maka dari itu sering saya sampaikan, setinggi apapun kita menuntut ilmu pengetahuan, berakhlak agama itu sangat penting dalam rangka menerapkan apa yang kita lakukan sehari-hari,” (I Komang Gede Sanjaya, 58 tahun, wawancara 26 Juni 2024).

Meskipun masyarakat Kabupaten Tabanan terdiri dari penganut agama yang berbeda, menurutnya selama ini pihaknya belum menuai kritikan terkait pencantuman akronim “AUM” dalam visi pemerintah. Bupati Sanjaya menegaskan bahwa yang tertera dalam visi adalah akronim “AUM” dari Aman, Unggul, Madani, bukan dalam konteks keagamaan. Ia berpendapat bahwa penggunaan “AUM” dalam maksud dan tujuan yang positif. Selain itu, ia mengklaim bahwa visi tersebut telah diwujudkan dengan berbagai program yang dirasakan manfaat positifnya oleh masyarakat Tabanan secara umum.

“Selama ini tidak ada (kritik). Karena AUM ini kan tidak kita simbolkan dalam arti negatif, tapi AUM, Aman

Unggul, Madani kan bagian dari visi misi. Jadi visi misi Aman Unggul Madani, tapi kalau saya bawa ke agama, di nomenklatur kan tidak tercatat di dalam visi misi Ang Ung Mang, tetapi itu bagian simbol-simbol kita saja. Astungkara-lah tidak ada yang mengritik, karena kita juga sangat relevan dan bagus itu dirasakan oleh masyarakat Hindu khususnya, masyarakat nonHindu pun merasakan dampaknya,” (I Komang Gede Sanjaya, 58 tahun, wawancara 26 Juni 2024).

Pada sisi lain, PHDI Tabanan mengungkapkan kekhawatiran adanya kesalahpahaman antara penggunaan “AUM” sebagai akronim Aman, Unggul, Madani dengan “AUM” sebagai aksara suci dalam konteks agama Hindu. Hal ini dikarenakan persepsi umat Hindu secara umum di Bali yang timbul selama ini, ketika mendengar istilah “AUM” mengarah pada aksara suci. Sehingga menurut Ketua PHDI Tabanan, perlu ada penjelasan yang bisa memberikan pemahaman kepada khalayak terkait “AUM” sebagai akronim Aman, Unggul, Madani. Hal ini penting untuk mencegah adanya anggapan yang keliru.

“Sedikit ada kekhawatiran kami, agar AUM sebagai visi pemerintah kabupaten tabanan, jangan sampai dianggap aksara sucinya daripada agama kita, Ang-Ung-Mang itu. Di sinilah peran kami nanti kepada masyarakat, AUM dalam konteks pemerintah Tabanan dengan Ang-Ung-Mang daripada umat kita itu, supaya ada garis yang jelas, sehingga paham, oh ini yang dimaksud,” (I Gede Ketut Sulistyaadi, S.Pd.H, 62 tahun, wawancara 23 Juli 2024).

Perlunya kejelasan batasan yang jelas antara “AUM” dalam konteks visi

Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan “AUM” sebagai aksara suci umat Hindu dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat Kabupaten Tabanan. Hal ini berkaitan dengan pemahaman politik dan keagamaan, walaupun keduanya terkadang tidak bisa benar-benar dipisahkan, karena pembelajaran maupun praktik politik di Indonesia juga harus senantiasa menghormati norma agama. Demikian pula dalam pengaturan agama di Indonesia tidak lepas dari peran politik, karena agama menjadi salah satu bidang yang juga dikelola pemerintah. Setidaknya, jangan sampai terjadi pencampuran antara kepentingan politik dengan agama.

Selain itu, masyarakat Kabupaten Tabanan juga terdiri dari beragam pemeluk agama, sehingga perlu multikulturalisme patut menjadi perhatian pemerintah. Triono (2022) menyebutkan bahwa multikulturalisme adalah konsep pengelolaan masyarakat yang plural melalui pemberian pengakuan, baik kultural maupun politis terhadap kemajemukan budaya masyarakat, sekecil apa pun kemajemukannya. Namun demikian, multikulturalisme juga sangat terkait dengan berbagai kepentingan yang berperan dalam ruang publik, terutama kepentingan politik dan ekonomi yang paling dominan. Sering kali, agama dijadikan alat untuk mencapai kepentingan tersebut. Namun, perlu diingat bahwa idealnya ruang publik harus sebisa mungkin terbebas dari kepentingan yang hanya menguntungkan kelompok kecil. Jika kepentingan egois kelompok ini dapat dihilangkan, maka tercapainya

"kebahagiaan" sosial dalam masyarakat akan menjadi lebih mungkin.

Meskipun ada kekhawatiran, Ketua PHDI Tabanan menyatakan belum mendengar adanya kritik atau keberatan terkait penggunaan akronim “AUM” yang dicantumkan dalam visi Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pihaknya selaku lembaga umat Hindu juga belum menerima adanya kritik maupun keberatan yang dinyatakan oleh pihak dari agama lain maupun masyarakat umum. Hanya saja, penjelasan tetap penting dilakukan agar mencegah kesalahpahaman. Sesuai saran PHDI Kabupaten Tabanan, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih menegaskan batasan antara “AUM” sebagai visi yang merupakan produk politik dengan “AUM” sebagai aksara suci agama Hindu. Hal ini berkaitan erat dengan etika sosial dalam penggunaan simbol keagamaan.

“Kami harapkan Peran pemda Tabanan, termasuk kami dari lembaga umat bisa ada batasan-batasan, kalau berbicara masalah visi ini yang dimaksud. Kalau bicara masalah keagamaan, ini yang dimaksud. Ini adalah tantangan kita kedepan nanti, bagaimana kita memberikan penguatan kepada mungkin di tataran anak-anak didik, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama, ini peran kita nanti parisada mempunyai tugas yang cukup kompleks juga di situ. Termasuk pemerintah daerah, sehingga tidak ada kerancuan ke depan. Kalau pun AUM ini masih dipakai kedepannya oleh Pemkab, masyarakat, umat, atau siapaun sudah mempunyai pemahaman,” (I Gede Ketut Sulistyaadi, S.Pd.H, 62 tahun, wawancara 23 Juli 2024).

Pada sisi lain, ada pula ide untuk membangun politik dengan nilai spiritual. Seperti dinyatakan Utomo (2022), bahwa bangsa Indonesia perlu memiliki landasan spiritual yang jelas dalam bernegara, karena politik yang kehilangan spiritualitas akan menjadi hampa dan rentan menuju keburukan. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengisi kekosongan spiritual tersebut dengan semangat yang baik. Agama menawarkan solusi ini, di mana agama dan negara bisa bersatu meskipun tidak diimplementasikan secara langsung melalui undang-undang. Setidaknya, nilai-nilai dan norma-norma dalam undang-undang tersebut harus memiliki semangat spiritualitas dan religiusitas yang dapat diterima oleh semua agama di Indonesia.

## SIMPULAN

“AUM” yang digunakan dalam visi oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dibawah kepemimpinan Bupati I Komang Gede Sanjaya dan Wakil Bupati I Made Edi Wirawan merupakan akronim dari Aman, Unggul, Madani. Misi tersebut diturunkan menjadi misi Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2024. Pada saat yang sama, “AUM” yang merupakan aksara suci dalam agama Hindu juga menjadi inspirasi secara filosofis kepemimpinan Bupati I Komang Gede Sanjaya dan Wakil Bupati I Made Edi Wirawan. Walaupun tidak tertera dalam visi, namun simbol keagamaan tersebut dimaknai sebagai salah satu ide pembangunan Kabupaten Tabanan.

Penggunaan “AUM” dinilai memiliki dampak positif dalam pembangunan Kabupaten Tabanan. Hal

ini dilihat dari berbagai pencapaian Kabupaten Tabanan selama 2021-2024. Pemerintah tidak hanya membangun di hulu, namun juga tengah, dan hilir melalui berbagai program yang diturunkan dari visi dan misi yang telah dibuat. Meskipun demikian, dalam sisi etika sosial, diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait batasan antara “AUM” dalam konteks pemerintahan yang lahir dari konsep politik dengan “AUM” dalam konteks keagamaan. Hal ini melihat masyarakat Kabupaten Tabanan terdiri dari berbagai pemeluk agama. Demikian pula bagi umat Hindu khususnya, agar tidak terjadi kerancuan pemahaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, Ali Moh. (2013). Partai Politik dan Pemilukada (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya). Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 1(3), 352-372. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/MAATN>
- Fitriansyah, F. (2018). Efek Komunikasi Massa Pada Khalayak (Studi Deskriptif Penggunaan Media Sosial dalam Membentuk Perilaku Remaja). Jakarta: Cakrawala. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawalahttps://doi.org/10.31294/jc.v18i2> .
- Gulo, Desmana Jaya. (2022). Pola Komunikasi Politik Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat. Jurnal Social Opinion, 6(2), 93-103. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/i>



- ndex.php/socialopinion/article/view/1261
- <https://bali.antaranews.com/berita/300033/pemkab-tabanan-luncurkan-program-semara-ratih-urus-pencatatan-perkawinan> (diakses pada 2 Oktober 2024)
- <https://balitribune.co.id/content/lanjutan-visi-misi-tabanan-era-baru-yang-aum> (diakses pada 10 Agustus 2024)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Tabanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tabanan) (diakses pada 12 Februari 2024)
- <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/mengenal-arti-simbol-jenis-dan-fungsinya-209W17KbLX9/full> (diakses pada 12 Februari 2024)
- <https://tabanankab.go.id/home/mengenal-tabanan/selayang-pandang> (diakses pada 5 September 2024)
- <https://www.detik.com/bali/berita/d-6904972/bupati-tabanan-luncurkan-program-sida-aum-alokasikan-rp-1-9-miliar> (diakses pada 12 Februari 2024)
- Lopulalan, Dortje L.Y. (2023). Komunikasi Politik dalam Pemerintahan. *Jurnal Hipotesa*, 17(2), 11-22. <https://ejurnal.stiaalazka.ac.id/index.php/ojs-hipotesa/article/view/76>
- Maharani W.W., Aura. (2023). Penggunaan Simbol Agama Yang Membentuk Stereotip Dari Persepsi Masyarakat. *Jurnal Moderasi*, 1(2), 1-15. <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/179>
- Maiwan, Mohammad. (2018). Memahami Teori-teori Etika: Cakrawala dan Pandangan. *Jurnal Universitas Negeri Jakarta* 17(2), 193-215. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/9093>
- Malik, Abdul. (2021). Tindakan Sosial Penggunaan Simbol Agama Dalam Poster Kampanye Legislatif Tahun 2019 Di Provinsi Banten. *Jurnal Linimasa* 4(1), 1-9. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/3355>
- Nata, Kadek Andre Roy & I Wayan Titra Gunawan. (2021). Konsep Ketuhanan Dalam Lontar Sang Hyang Mahajnana. *Jurnal Swara Widya*, 1(2), 158-168. <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/swarawidya/article/view/1710>
- Tim Penyusun. (2024). Kabupaten Tabanan dalam Angka 2024. Tabanan: Badan Pusat Statistik
- Triguna, I. Y. (2018). Konsep Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Hindu. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 18(1), 71-83. <https://doi.org/10.32795/ds.v1i18.104>
- Triono, Andit. (2020). Membumikan Etika Sosial dan Pemahaman Multikultural Umat Beragama Melalui Pendidikan Tinggi. *Jurnal Holistik*, 4(1), 1-10.
- Utomo, Wahyu Wiji dkk. (2020). Spiritualisme dan Politik (Filosofi dalam Politik di Indonesia). *Jurnal Review Politik*, 10(1), 141-166. <https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/view/1413>
- Wardani, Aura Maharani Wisnu dkk. (2023). Penggunaan Simbol Agama Yang Membentuk Stereotip Dari Persepsi

Masyarakat. Jurnal Kajian Islam  
Kontemporer, 1(1), 1-25.  
<https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/179>